

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian di lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan minapolitan, dan sebagai wujud dukungan secara politik, maka pemerintah Kabupaten

Gresik membuat regulasi sebagai berikut:

- a. Keputusan Bupati Gresik, Nomor: 050/44/HK/437.12/2012 tentang Tim Teknis Penyusunan *Masterplan* Kawasan Minapolitan.
- b. Keputusan Bupati Gresik Nomor: 523/283/HK/437.12/2011 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Gresik.
- c. *Masterplan* Minapolitan Kabupaten Gresik tahun 2011
- d. Kebijakan dan Realisasi Kegiatan Pembangunan di Kawasan Minapolitan Tahun 2012

2. Dalam mengimplementasikan kebijakan minapolitan di Desa Srowo, Kecamatan Sidayu, Pemerintah Kabupaten Gresik telah memperhatikan dua aspek penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu:

- a. Aspek komunikasi. Sejauh ini pemerintah Kabupaten Gresik sebelum dan ketika mengimplementasikan kebijakan minapolitan telah melakukan koordinasi, komunikasi dan sosialisasi kepada

institusi terkait. Namun sejauh ini belum optimal, hal ini dibuktikan masih adanya petani, aparat desa maupun kelompok budidaya tambak yang belum memahami inti dari kebijakan minapolitan. Kondisi ini dikarenakan kurangnya sosialisasi secara langsung dan bersifat tidak formal terhadap petani tambak.

- b. Aspek sumber daya. Desa Srowo memiliki sumber daya manusia yang sangat cakap dalam kegiatan budidaya. Kemudian secara *material* kawasan Srowo merupakan kawasan yang hampir 70% adalah tambak dan sangat berdekatan dengan Desa Sedagaran yang menjadi pusat pembibitan udang dan bandeng. Sejauh ini pemerintah juga memberikan pelatihan kepada petani dan fasilitas yang dibutuhkan. Kemudian pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah memberikan anggaran dana pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. Dalam aspek pasar sejauh ini hasil tambak dipasarkan di wilayah lokal, domestik, hingga internasional melalui kerjasama dengan *supplier*. Namun hingga saat ini dalam implementasi kebijakan minapolitan di Desa Srowo juga terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, yaitu sulitnya petani maupun *supplier* untuk mendapatkan bibit yang berkualitas, kurangnya aspek pasar, kurangnya modal sehingga sampai saat ini belum mampu menyediakan sarana berbasis teknologi untuk

mewujudkan industrialisasi hasil perikanan dan meningkatkan kemampuan petani tambak.

3. Dalam implementasi kebijakan minapolitan di Desa Srowo, Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik terdapat kemitraan yang berbasis *sustainable development* oleh tiga aktor pembangunan yaitu:

a. Pemerintah. Sejauh ini pemerintah telah menjalankan perannya sebagai pembuat regulasi, fasilitator, penyedia modal pembangunan baik secara fisik dan non fisik yang dilandaskan pada empat prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

b. Swasta. Dalam hal ini *supplier*, sejauh ini telah menjalankan perannya sebagai penyedia modal bagi masyarakat, membantu dalam aspek pasar, maupun memberikan pelatihan terhadap petani tambak. Namun *supplier* sejauh ini dalam menjalankan perannya belum mampu menerapkan semua prinsip pembangunan berkelanjutan.

c. Masyarakat. Adanya keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat, khususnya petani, dan kelompok budidaya tambak, maka sampai sejauh ini sebagai langkah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan hanya bisa melakukan dengan cara menjaga kelestarian lingkungan tambak dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan dan terus menjalankan aktifitasnya sebagai pembudidaya tambak.

4. Sejauh ini telah terjadi kemitraan antara pemerintah dengan pihak swasta, dalam hal ini investor maupun perusahaan-perusahaan yang terdapat di Kabupaten Gresik dalam bentuk rencana pembangunan baik secara fisik maupun non fisik. Kemudian pemerintah juga melakukan kerjasama dengan *supplier* lokal di kawasan Srowo. Selain itu pemerintah juga melakukan mitra kerjasama dengan kelompok budidaya tambak, dan petani tambak sejauh ini juga menjalin kerjasama dengan *supplier* lokal. Pola kemitraan yang terjadi sejauh ini adalah bersifat mutualistik. Selama ini terdapat pola kemitraan yang menarik di kawasan Srowo yaitu kerjasama yang saling menguntungkan antara petani tambak dan *supplier* tidak atas sebuah perjanjian tertulis dan terikat namun hanya dilandasi atas dasar kepercayaan.

## B. Saran

Dalam rangka meningkatkan keberhasilan kebijakan minapolitan di Desa Srowo, Kecamatan Sidayu, maka diperlukan beberapa tindakan sebagai berikut:

1. Kebijakan minapolitan merupakan aset bagi pemerintah Kabupaten Gresik dalam rangka optimalisasi potensi perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Srowo serta dapat meningkatkan PAD Kabupaten Gresik. Oleh karena itu dibutuhkan adanya pengawalan dari semua *stakeholder* untuk keberlanjutan kebijakan minapolitan.

2. Dalam rangka mewujudkan keberlanjutan dari kebijakan minapolitan, maka pemerintah Kabupaten Gresik harus meningkatkan kuantitas dan kualitas koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat dalam rangka mensosialisasikan adanya kebijakan minapolitan melalui pendekatan yang tidak formal serta menyesuaikan dengan kultur masyarakat petani tambak.
3. Pemerintah atas kerjasama dengan pihak swasta harus mampu mengupayakan terbukannya akses modal dan pasar serta ketersediaan teknologi yang ramah lingkungan di kawasan minapolis. Hal ini dalam rangka meningkatkan kemampuan petani dan mewujudkan industrialisasi dikawasan minapolitan.
4. Pemerintah diharapkan dapat memfasilitasi petani untuk mendapatkan bibit yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas produksi bandeng agar dapat diterima dipasar internasional.
5. Pemerintah bersama pihak swasta dan masyarakat perlu mempertajam misi pembangunan berbasis *sustainable development* dalam rangka meningkatkan keseimbangan dan menjamin keberlanjutan implementasi kebijakan minapolitan. Hal ini dikarenakan sejauh ini pembangunan kebijakan minapolitan lebih bernuansa pada peningkatan aspek ekonomi.